

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2006:3).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Selain itu tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, menyebabkan kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini karena masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah daerah secara maksimal. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Audyta et al., 2013).

Kinerja merupakan suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indra Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Surjadi (2009:7) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, yang berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Menurut Suwardjono (2005:18) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Sistem pengendalian internal dalam kegiatan pemerintah sangat dibutuhkan agar tercipta kinerja yang baik. Pengendalian internal diterapkan dalam kegiatan pemerintahan guna mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sukmaningrum (2012) mengungkapkan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen yang efektif yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Alvin A. Arens et al., yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 2008:412).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan atau program yang telah disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Abdul Halim (2012) mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan

pemerintah yang berdaya guna. Pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepres Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu kondisi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban dalam organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Meskipun demikian, penulis menemukan adanya beberapa fenomena yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di wilayah Indonesia diantaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada tahun 2013 yang mendapatkan status *Disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan Pemkab Bandung yang mendapatkan status *disclaimer* dari BPK merupakan sebuah kemunduran karena dari dulu mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini merupakan peringatan keras agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja lebih baik terutama dalam tertib administrasi.

Ada empat persoalan yang mengganjal laporan Pemkab Bandung, namun dua masalah sudah bisa diselesaikan seperti di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sedangkan dua persoalan lainnya termasuk berat yakni manajemen aset, karena aset Pemkab Bandung senilai Rp 67 triliun tidak diuraikan dengan jelas. Masalahnya dari kesalahan penunjukkan konsultan untuk menghitung aset. Kalau sebelumnya kami memakai konsultan BPKP dan terurai jelas aset-asetnya, namun setelah memakai konsultan swasta malah tambah runyam. Sedangkan persoalan lainnya adalah pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 11 miliar yang

tidak dilengkapi dengan bukti pembelian. Akhirnya OPD dan Kecamatan harus mengembalikan uang Rp 11 miliar ini kepada negara akibat keteledoran tidak memakai bukti pembelian. Ada juga bukti pembelian BBM yang palsu, sehingga persoalannya semakin berat. Jumlah anggaran pembelian BBM yang harus dikembalikan OPD dan Kecamatan sebesar Rp 11 miliar. Termasuk truk-truk angkutan sampah juga tidak menggunakan bukti pembelian BBM, sehingga Dinas Permukiman Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) harus mengganti biaya pembelian ini. (Sumber: www.pikiran-rakyat.com diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018)

Kepala BPK Perwakilan Jabar, Cornell Prawiradiningrat mengatakan dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 masih menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD TA 2014 di hampir seluruh Pemerintah daerah (Pemda) yaitu tentang penatausahaan aset tetap yang belum tertib, diantaranya tanah Pemda yang belum bersertifikat dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Kedua adalah pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil. Permasalahan ketiga yaitu tentang penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid. Keempat, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut, khususnya yang diterima Pemda dari BPJS Kesehatan pada periode Januari s.d. April 2014 atau sebelum terbitnya Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi. Terakhir, keberadaan BUMD (non

PDAM) yang didirikan oleh Pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda. Pemeriksaan atas LKPD TA 2014 dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada BPK bahwa Pemda telah menyajikan secara wajar semua akun di dalam LKPD TA 2014 sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. (Sumber: bandung.bisnis.com diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018)

Kasus selanjutnya yaitu terdapat kelemahan dalam pencatatan kepemilikan aset di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Kondisi ini yang membuat Pemkab Bandung kembali diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Bandung Dadang M. Naser berdalih, ada perbedaan persepsi dalam pencatatan aset antara Pemkab Bandung dengan BPK. Apalagi BPK menggunakan sistem akrual dalam metode pencatatan pelaporannya. Seperti pencatatan aset kendaraan, pihaknya hanya mencatat plat nomor dan keberadaannya saja. Sedangkan BPK mengharuskan juga Pemkab Bandung memasukkan nomor rangka dan nomor mesin. Begitu juga dengan aset sekolah, harus dicatatkan secara detail, mulai dari luas lahan, jumlah ruangan, alamat lengkap, dan informasi lainnya. Sedangkan pihaknya hanya mencatat data-data umumnya saja. Hal inilah yang menjadi penyebab Pemkab Bandung kembali meraih opini WDP.

Menurut Dadang M. Naser, tahun 2015 Pemkab Bandung mendapatkan opini WDP plus atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) min. Aset yang masih menjadi masalah, karena sistem pencatatan pelaporan yang digunakan itu akrual jadi harus ada penyesuaian. Untuk urusan aset ini pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun lalu. Dia pun

mengklaim laporannya sudah rapi, namun sayangnya tetap terdapat perbedaan persepsi antara Pemkab Bandung dengan BPK. Meskipun demikian, pihaknya akan merespon dan memperbaiki kekurangan sesuai dengan rekomendasi dari BPK, sehingga diharapkan pada tahun berikutnya Pemkab Bandung bisa meraih opini WTP.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdulah mengatakan bahwa kembali diraihnya opini WDP ini substansinya bukan hanya masalah administrasi saja, tetapi lebih kepada buruknya manajemen aset. Padahal aset pemda itu adalah titipan rakyat yang harus dikelola pemerintah dan dikawal langsung oleh Kepala Daerah sebagai pimpinannya yakni Bupati Bandung. Jika tidak dikawal dengan baik, tidak menutup kemungkinan bisa berpindah tangan kepemilikannya, seperti pada lahan Disnakan Provinsi Jabar. Selain itu, manajemen aset yang buruk juga bisa mengakibatkan penyalahgunaan. (Sumber: <http://inilahkoran.com> diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018)

Fenomena yang selanjutnya menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 35 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2015, terdapat 474 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 507 ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 198,29 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp 19,19 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 22,09

miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemda telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp 2,26 miliar. (Sumber: www.bpk.go.id diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018)

Fenomena lainnya terkait pengelolaan keuangan yang penulis kutip dari detik *news* yaitu BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten dan kota. Hasilnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang gagal raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala BPK Perwakilan Jabar, Arman Syifa mengatakan penyerahan LHP LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten dan kota. TA 2017 hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Persoalan yang terdapat di Pemkab Bandung Barat yaitu mengenai belanja pemeliharaan yang tidak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian. (Sumber: <https://m.detik.com> diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018)

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini kelima kalinya Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP dibawah kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada tahun 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat Soemitra sejak tahun 2013. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maman Sunjaya membenarkan hal itu. “Suratnya masih ada di Bupati dan belum dibuka. Tapi, secara lisan kami sudah diberitahu

bahwa Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP”. Dia menuturkan penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut dia meski sudah bertahun-tahun, masalah aset memang sulit diselesaikan. Sebab hal itu membutuhkan penelusuran secara teliti. “Jadi tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun, kecuali kalau aset-aset itu dihapuskan. Tapi, itu tidak mungkin”, ujarnya.

Seperti diketahui menjelang 10 tahun usianya, Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat. Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung.

Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Kholid Nurjamil menilai gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih WTP menunjukkan tidak adanya *progress* yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya. “Seandainya ada perbaikan, mungkin LKPD Tahun 2016 sudah menjadi WTP” ujar Kholid. Menurut dia, opini yang diberikan BPK terhadap Pemkab Bandung Barat disalip oleh Kabupaten Pangandaran yang notabene daerah otonomi yang lebih muda. Kabupaten Pangandaran sudah mampu meraih opini WTP dari BPK. Dengan kondisi itu, dia meminta agar Pemkab meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya. Juga memiliki pemahaman terhadap peraturan, sehingga akan ada kepatuhan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian internal juga perlu diperhatikan. (Sumber: www.pikiran-rakyat.com diakses pada hari Rabu tanggal 21 November 2018)

Fenomena yang terjadi membuktikan bahwa masih banyaknya pemerintah daerah, khususnya pegawai perangkat daerah yang berkinerja buruk dan tidak memiliki integritas yang baik terhadap profesinya. Pegawai tersebut kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perangkat daerah, khususnya pegawai yang bekerja pada lembaga instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti oleh Dita Arfianti (2011), Gerry Armando (2013), Syarif Syahrir Malle (2013), Ferawati Fajrin (2014), Tendy Septiadi (2014), Silfiana (2015), Fitriani Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017).
2. Pengawasan Keuangan Daerah yang diteliti oleh Dita Arfianti (2011), Irfan Ikhwanul Haza (2013), Gerry Armando (2013), Syarif Syahrir Malle (2013), Ferawati Fajrin (2014), Tendy Septiadi (2014), Silfiana (2015), Kuasa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2016), Reni Kombong (2017), Fitriani

- Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017).
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diteliti oleh Dita Arfianti (2011), Irfan Ikhwanul Haza (2013), Reni Kombong (2017), Fitrini Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017).
 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh Syarif Syahrir Malle (2013).
 5. Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan yang diteliti oleh Kuasa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2016).
 6. Regulasi yang diteliti oleh Kuasa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2016).
 7. Kualitas Sumber Daya Manusia yang diteliti oleh Dita Arfianti (2011), Fitrini Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017).
 8. Komitmen Organisasi yang diteliti oleh Pretisila Kartika Putri (2017).

Tabel 1.1

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

Nama Peneliti	Tahun	Sistem Pengendalian Internal	Pengawasan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan	Regulasi	Kualitas Sumber Daya Manusia	Komitmen Organisasi
Dita Arfianti	2011	✓	X	X	-	-	-	X	-
Irfan Ikhwanul Haza	2013	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Gerry Armando	2013	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Syarif Syahrir Malle	2013	X	X	-	✓	-	-	-	-
Ferawati Fajrin	2014	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Tendy Septiadi	2014	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Silfiana	2015	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Kuasa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah	2016	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
Reni Kombong	2017	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Fitrini Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni	2017	✓	✓	X	-	-	-	X	-
Pretisila Kartika Putri	2017	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Keterangan:

✓ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Silfiana (2015) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung pada tahun 2015. Variabel yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Unit analisis dan populasi dalam penelitian ini meliputi anggota DPRD Kota Bandung dan pegawai Inspektorat Kota Bandung yang berjumlah 90 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 90 lembar. Dari kuesioner yang dibagikan tersebut, hanya 75 lembar kuesioner yang dapat diterima kembali untuk diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan penulis memilih variabel tersebut karena masih ada hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang diteliti

oleh Dita Arfianti (2011), Gerry Armando (2013), Ferawati Fajrin (2014), Tedy Septiadi (2014), Silfiana (2015), Fitriani Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syarif Syahrir Malle (2013) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya variabel pengawasan keuangan daerah yang diteliti oleh Irfan Ikhwanul Haza (2013), Gerry Armando (2013), Ferawati Fajrin (2014), Tedy Septiadi (2014), Silfiana (2015), Kuasa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2016), Reni Kombong (2017), Fitriani Mansur, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni (2017), Pretisila Kartika Putri (2017) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Arfianti (2011), Syarif Syahrir Malle (2013) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang direplikasi yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Silfiana (2015) menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sedangkan penulis menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel *intervening*. Selain itu, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di DPRD Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Pengawasan Keuangan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Apakah terdapat hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
10. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Keuangan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktik.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dalam pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti, terutama mengenai penelitian yang membahas kajian akuntansi sektor publik. Selain itu dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan masukan dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung guna meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Soreang Km. 17, Komplek Pemda Kabupaten Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan obyek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.